

**PENGARUH RASIO EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
EFISIENSI BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE
2018-2023**

Rahil

Universitas Bina Sarana Informatika

rahilrahil185@gmail.com

Dwiyatmoko Puji Widodo

Universitas Bina Sarana Informatika

dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id

Yuni Siti Nuraeni

Universitas Bina Sarana Informatika

yuni.yns@bsi.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dasar pembiayaan daerah, kemampuan suatu daerah untuk menggali PAD akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan daerah tersebut. Salah satu lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa berpengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan: (1) Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah (2) Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan periode 2018-2023. Sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,036 (2) Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,388 (3) Rasio Efektivitas PAD dan Efisiensi Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,035.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Efektivitas Pendaptan Asli Daerah, Efisiensi Belanja Daerah

ABSTRACT

Regional Original Income (PAD) is the basis of regional financing, the ability of a region to explore PAD will have an impact on the growth and development of the region. One of the local government agencies responsible for environmental management is the DKI Jakarta Environment Agency. The purpose of this study is to find out how much the financial ratio affects financial performance: (1) The effectiveness of PAD on Regional Financial Performance (2) the efficiency of Regional Expenditure on Regional Financial Performance for the period 2018-2023. The samples used are the Budget Realization Report and the Performance Report of Government Agencies of the DKI Jakarta Provincial Environment Agency for the 2018-2023 Period which have been audited by the Financial Audit Agency (BPK). The results of this study show that (1) The effectiveness of PAD has an effect on Regional Financial Performance with a significant value of 0.036 (2) Regional Expenditure Efficiency has no effect on Regional Financial Performance with a significant value of 0.388 (3) The PAD Effectiveness Ratio and Regional Expenditure Efficiency together have a significant effect on Regional Financial Performance with a significant value of 0.035.

Keywords : Regional Financial Performance, Effectiveness of Regional Original Funding, Regional Expenditure Efficiency

PENDAHULUAN

Dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, akuntansi sektor publik telah maju secara signifikan. Menurut undang-undang saat ini, pemerintah daerah diberdayakan oleh pemerintah pusat untuk mengelola fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Otonomi ini memungkinkan setiap daerah atau kabupaten untuk secara mandiri meningkatkan pendapatan mereka untuk kepentingan warganya. Peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah harus mengarah pada hasil yang lebih baik, mendorong masyarakat untuk mengevaluasi kinerja mereka secara kritis. Transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga sektor publik dengan sangat penting. Akuntabilitas memperlihatkan sejauh mana lembaga sektor publik menggunakan dana publik dengan baik dan memastikan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaannya, termasuk dalam distribusi sumber daya ekonomi melalui pelaksanaan manajemen publik yang efisien. (SAIFRIZAL, 2022)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah satu dari sekian banyak organisasi yang bertugas melaksanakan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas ini menyusun Laporan Kinerja Pemerintah dan Perjanjian Kinerja untuk 1 (satu) tahun anggaran di bawah pimpinan Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Al-Jauhari, 2021)

Salah satu komponen utama APBD adalah pendapatan daerah yang termasuk dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan ini terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah untuk mendorong desentralisasi. Namun, data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran memiliki korelasi yang lebih kuat dengan pengeluaran daerah daripada pendapatan asli daerah.

Pengeluaran dan pendapatan daerah di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Jakarta berflukasi, menunjukkan betapa pentingnya menggunakan laporan belanja daerah dan pendapatan asli daerah dari laporan realisasi anggaran untuk mengetahui bagaimana sumber daya ekonomi diterima dan digunakan. Dengan mempertimbangkan efektivitas pendapatan daerah dan efisiensi belanjanya, rasio keuangan ini menilai apakah kinerja keuangan telah mencapai tingkat kepentingan yang sesuai dengan anggarannya.

Analisis rasio keuangan tertentu yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah unsur proses evaluasi kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan. Maka dari itu, APBD bisa digunakan sebagai patokan untuk menentukan signifikansi kinerja keuangan pemerintah. Ketika mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah yang ditugaskan untuk pembangunan dan layanan masyarakat, akuntabilitas keuangan sangat penting. Berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan, penilaian pemerintah tidak berfokus pada laba bersih atau keuntungan (*profit* atau *net income*). Sebaliknya, tujuan keuangan berpusat di sekitar manajemen anggaran, dengan perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran yang disebut sebagai surplus atau defisit. (Awaliyah & Efendri, 2019).

Kinerja keuangan daerah merujuk pada kapabilitas suatu wilayah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara optimal guna memenuhi kebutuhan dan mendukung layanan pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dengan efektifitas, efisiensi, keekonomisan, akuntabilitas, dan transparansi dapat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. (IJTIHAD & HARSONO, 2024).

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja keuangan daerah. Penelitian Rauhul Ijtihad (2024) Rasio kemandirian daerah, Efektifitas PAD dan Pengelolaan Belanja Daerah adalah beberapa variabel yang digunakan. Kemandirian daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif, efektifitas PAD tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

(Nur Shafira Anynda, 2020) Hal serupa juga yang dilakukan dengan membandingkan variabel Kemandirian Daerah, Efektifitas PAD dan Pengelolaan Belanja Daerah. Menurut penelitiannya di BPKAD. Tiga variabel yang secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu kemandirian, Efektifitas PAD dan Pengelolaan Belanja Daerah.

(Aulia & Sari, 2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

KAJIAN TEORI

Rasio Keuangan

Menurut (Sartika, 2019) salah satu strategi untuk mengevaluasi kinerja keuangan dari sudut pandang manajemen keuangan pemerintah diteliti melalui analisis rasio-rasio keuangan terkait dengan Anggaran APBD yang sudah disetujui dan dieksekusi. Fokus penelitian ini yaitu rasio keuangan spesifik berupa rasio Efektifitas PAD dan rasio Efisiensi Belanja Daerah.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo, (2018:146) dalam (SAIFRIZAL, 2022) yang mengatakan bahwa “definisi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu merupakan perbandingan antara outcomedan output yang mengarah pada tingkat pencapaian hasil program yang telah disusun dan direncanakan dengan target yang telah ditetapkan”. Rasio ini dievaluasi dengan mengevaluasi kapasitas sebenarnya dari suatu daerah dengan membandingkan hasil aktual dari pendapatan asli daerah yang diantisipasi dengan target yang sudah disesuaikan. Pendapatan dari perencanaan pendapatan asli daerah harus dilakukan perbandingan dengan target untuk menyelesaikan perhitungan ini. Berikut ini adalah urutan perhitungan yang dilakukan:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Pemerintah daerah harus menentukan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan total pendapatan mereka guna menilai efisiensi dari kegiatan pengumpulan pendapatan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengumpulan pendapatan dianggap efisien jika rasio biaya terhadap pendapatan nilainya kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Lebih rendahnya rasio menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi.

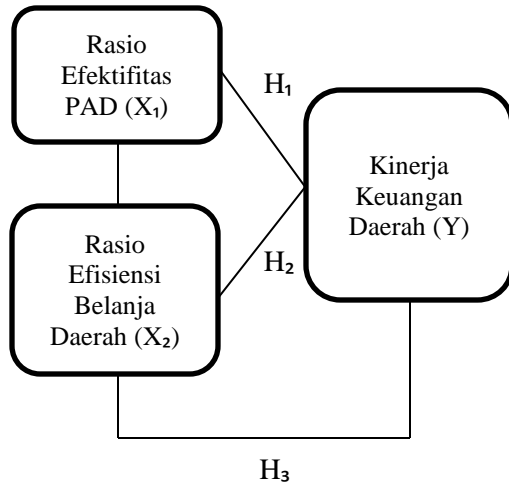
$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100$$

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Selanjutnya menurut Mariani, (2013:64) dalam (SAIFRIZAL, 2022) “Kinerja keuangan daerah adalah Kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat daerah serta pembangunan daerahnya tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat sehingga daerah dapat mengelola dana untuk kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Hipotesis

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis diatas, Adapun hipotesis penelitian bisa dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Hipotesis Penelitian
Sumber : Diolah oleh penulis, 2024

H₀: Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

H₁: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

H₀: Rasio Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
H₂: Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

H₀: Rasio Efektifitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

H₃: Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai data kuantitatif berdasarkan hasil rasio yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan data historis atau data sekunder yang terdokumentasi dan studi pustaka, digunakan dalam proses pengumpulan data dari bagian keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kriteria sampel yang digunakan ialah data Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup provinsi DKI Jakarta periode 2018-2023

Teknik Analisis Data

Menurut (Sutriani & Octaviani, 2019), “Tujuan analisis data adalah untuk membuat data kuantitatif lebih mudah dipahami. Hasil analisis ini paling sering disajikan dalam bentuk data frekuensi, tabel, atau crosstab, dengan atau tanpa perhitungan statistik. Analisis data menggunakan model statistik parametrik. Model ini digunakan untuk menentukan parameter populasi menggunakan statistik dan mengukur populasi menggunakan data sampel”.

Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear untuk melakukan pengujian. Menurut (Prasetyo et al., 2021) Regresi linier merupakan sebuah metode statistik guna menilai kuatnya hubungan yang terjadi pada variabel dependen dan independen. Metode ini sering digunakan dalam analisis untuk memahami hubungan antara variabel dependen (Y) dengan satu atau lebih variabel independen (X), yang juga dikenal sebagai variabel prediktor. Persamaan berikut ini sering digunakan untuk menganalisis regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Daerah

α = Konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisien Regresi

X_1 = Rasio Efektifitas PAD

X_2 = Rasio Efisiensi Belanja Daerah

e = Error

Pengolahan data ini digunakan untuk melakukan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi, Uji Hipotesis: Uji T, Uji F

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimu	Maxi	Mean	Std.
		m	mum		Deviation
Efektivitas PAD	6	95,51	190,48	126,710	38,5680
Efisiensi Belanja Daerah	6	85,33	95,14	90,7650	4,49916
Kinerja Keuangan	6	64,39	95,16	85,8933	11,95824
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Analisis deskriptif yang tersaji dalam tabel 1 mengindikasikan rasio

1. Rasio efektivitas PAD mempunyai nilai *minimum* 95,51, *maximum* 190,48, *mean* 126,7100 dan *std deviation* 38,56804.
2. Rasio efisiensi belanja daerah mempunyai nilai *minimum* 85,33, *maximum* 95,14, *mean* 90,7650 dan *std deviation* 4,49916.
3. Kinerja Keuangan mempunyai nilai *minimum* 64,39, *maximum* 95,16, *mean* 85,8933 dan *std deviation* 11,95824.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

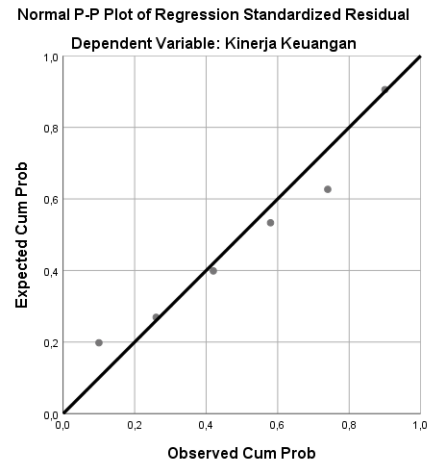
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean ,0000000
	Std. Deviation 3,90977843
Most Extreme Differences	Absolute ,172
	Positive ,172
	Negative -,137
Test Statistic	,172
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Uji Kolmogorov-Smirnov ditujukan dalam uji normalitas berdasarkan tabel 2, dan hasilnya adalah 0,172. Hal tersebut menunjukkan terjadi distribusi normal pada variabel penelitian karena lebih besarnya nilai

taraf signifikansi 0,200 dari pada tingkat kesalahan 0,05, menandakan bahwa variabel penelitian didistribusikan secara normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Plot

Penyebaran data terjadi di sekitar dan mengikuti garis diagonal yang bisa diamati dari plot probabilitas normal pada Gambar 2 Hal tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan distribusi data secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Efektivitas PAD	,723	1,384
	Efisiensi Belanja Daerah	,723	1,384

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Data pada tabel 3 menunjukkan jika variabel rasio efektivitas PAD (X1) dan rasio efisiensi belanja daerah (X2 memiliki nilai VIF sebesar 1,384 yang nilainya kurang dari 10. Sehingga bisa diarahkan jika tidak terdapat indikasi multikolinearitas pada model regresi penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Standardized Coefficients			
	B	Beta	T	Sig
1 (Constant)	24,816		1,616	,205
Efektifitas PAD	,028	,471	1,550	,219
Efisiensi Belanja Daerah	-,281	-,552	-1,816	,167

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 4, bisa diamati nilai signifikansi pada variabel Rasio Efektivitas PAD (X₁) yaitu 0,219 dan variabel Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X₂) yaitu 0,167. Model ini tidak memiliki gejala heteroskedastisitas berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan, karena kedua variabel memiliki signifikansi 0,05.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,43614
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	6
Z	1,369
Asymp. Sig. (2-tailed)	,171

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Tabel 5 menunjukkan nilai Asymp dan Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, sehingga bisa diartikan tidak adanya autokorelasi pada ini.

Uji Regresi Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Standardized Coefficients			
	B	Beta	T	Sig
1 (Constant)	63,702		1,086	,357
Efektifitas PAD	-,251	-,808	-3,638	,036
Efisiensi Belanja Daerah	,594	,224	1,007	,388

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Hasil pengujian antara Rasio Efektivitas PAD (X₁) dengan Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X₂) ditunjukkan pada Tabel 6. Nilai koefisien regresi untuk Rasio Efektivitas PAD (X₁) sebesar -0,251, seperti yang ditunjukkan oleh kinerja keuangan daerah (Y). dan 0,594 merupakan Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X₂) pada variabel independen, engan nilai konstanta sebesar 63,702. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 63.702 + 0.251X_1 + 0.594X_2$. Berdasarkan pengujian persamaan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 63,702 mencerminkan tidak adanya variabel rasio efektivitas PAD (X₁) dan rasio efisiensi belanja daerah (X₂). Kinerja keuangan daerah sebesar 63,702.
- Nilai koefisien Rasio Efektivitas PAD (X₁) yaitu 0,251 yang menjelaskan dengan nilai variabel lain tetap, maka kenaikan Rasio Efektivitas PAD (X₁) yaitu 1% akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar -0,251.
- Nilai koefisien rasio efisiensi belanja daerah (X₂) mempunyai nilai 0,594 yang menunjukkan nilai konstan variabel independen lainnya. Peningkatan rasio efisiensi belanja daerah (X₂) sebesar 1% meningkatkan kinerja fiskal daerah sebesar 0,594.

Uji Hipotesis

Uji T

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Standardized Coefficients			
	B	Beta	T	Sig
1 (Constant)	63,702		1,086	,357
Efektifitas PAD	-,251	-,808	-3,638	,036
Efisiensi Belanja Daerah	,594	,224	1,007	,388

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Hasil uji-t ditunjukkan pada Tabel 7, di mana derajat kebebasannya adalah $df = (n-k)$ atau $df = (6-3) = 3$, dan nilai t-tabel untuk signifikan adalah 0,05. Hasilnya, 3,182 adalah hasil t-tabel. Berikut ini adalah hasil dari penjelasan dari variabel yang diamati:

a. Variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji t menjelaskan jika rasio efektivitas PAD (X1) berpengaruh signifikan pada keberhasilan keuangan daerah (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari ambang batas 0,05 ($0,036 < 0,05$), yang mengindikasikan adanya signifikansi secara statistik. Demikian pula, hasil uji-t sebesar -3,638 lebih kecil dari nilai kritis 3,182 ($-3,638 < 3,182$), yang lebih lanjut mendukung signifikansi temuan secara statistik.

b. Variabel Efisiensi Belanja Daerah

Hasil uji-t menggambarkan rasio efisiensi belanja daerah (X2) tidak memberikan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan regional (Y). Variabel efisiensi belanja daerah secara statistik tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,388 yang lebih besar dari ambang batas 0,05 ($0,388 > 0,05$). Selain itu, nilai t-test sebesar 1,007 lebih kecil dari nilai t kritis sebesar 3,182 ($1,007 < 3,182$).

Uji F

Dengan menggunakan Ftabel pada tingkat signifikansi 0,05, F tabel memperoleh nilai 9,55, yang digunakan untuk mengevaluasi hasil uji F sebagaimana terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	638,566	2	319,283	12,532	,035
Residual	76,432	3	25,477		
Total	714,998	5			

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan keuangan daerah (Y) secara signifikan nilai yang dihasilkan, 0,035, lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) berdasarkan nilai signifikansi yang diberikan pada Tabel 8. Selanjutnya, nilai uji F hitung yang dihasilkan adalah sebesar 12,532, yang lebih tinggi dari nilai F tabel sebesar 9,55 ($12,532 > 9,55$) yang diperoleh. Dengan demikian, dipengaruhi oleh ukuran-ukuran.

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta

Hubungan negatif yang terjadi pada rasio efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dari analisis data yang menerapkan uji regresi linier berganda yang menolak H_0 dan menerima H_1 . Hipotesis t memaparkan hasil thitung yang lebih kecil dari ttabel ($-3,638 < 3,182$) dan $0,036 < 0,05$ adalah nilai signifikansi

Menurut penelitian lain oleh Risya Aulia (2023) dan Putri & Darmayanti (2019) kemandirian PAD secara signifikan dan negatif berpengaruh pada kinerja keuangan, hasil penelitian ini selaras dengan temuan tersebut. Namun, penelitian Rauhul Ijtihad (2024) dan Meilany S.D. Liow (2019), menunjukkan tidak ada pengaruh efektivitas PAD dan tidak signifikan dengan kinerja keuangan, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian tersebut.

Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah DLH Prov.Jakarta

H_0 diterima dan H_2 ditolak berdasarkan hasil analisis data. Hal tersebut mengindikasikan kinerja keuangan daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tidak dipengaruhi oleh rasio efisiensi belanja daerah. Uji regresi linier berganda digunakan dalam menganalisis data yang menghasilkan kesimpulan ini. Temuan dari uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa thitung[^] ttabel ($1,007 < 3,182$) dan $0,388 > 0,05$ adalah nilai signifikansi.

Menurut Deah Ayu Bantari (2022) dan Siska Yulia Defitri (2021), efisiensi belanja daerah tidak memberikan pengaruh pada kinerja keuangan dan tidak signifikan secara statistik. Studi ini mendukung kesimpulan mereka. Namun, temuan dari penelitian ini tidak selaras dengan Dessy Ari Permatasari (2022), Mulana Ramadhan (2022), Nur Shafira Anynda (2020), Rauhul Ijtihad (2024), dan Meilany S.D. Liow (2019), yang menunjukkan jika efisiensi belanja daerah

memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan kinerja keuangan.

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Prov.Jakarta

Menurut analisis data dari uji regresi linier berganda, H_0 ditolak dan H_3 diterima yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara simultan dipengaruhi oleh tingkat rasio efektifitas PAD dan tingkat rasio efisiensi belanja daerah. Dari f_{tabel} (12,532 > 9,55), pengujian hipotesis f menghasilkan hasil f_{hitung} dan nilai signifikansi (0,035 < 0,05), maka rasio efektifitas PAD dan rasio efisiensi belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

Temuan ini selaras dengan penelitian Rauhul Ijtihad (2024), Dessy Ari Permatasari (2022), Nur Shafira Anynda (2020), dan Meilany S.D Liow (2019), yang menunjukkan bahwa efektifitas PAD dan efisiensi belanja daerah memiliki pengaruh signifikan dan simultan dengan kinerja keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsekuensi dari Efektifitas PAD dan Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan di Lembaga Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2023. Kesimpulan didapatkan dari pembahasan yang dianalisis, sehingga kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Uji T yang menunjukkan bahwa T_{hitung} variabel rasio efektifitas PAD sebesar -3,638 < T_{tabel} sebesar 3,182 dan tingkat signifikansi sebesar (0,036 < 0,05).
2. Uji T yang menunjukkan bahwa T_{hitung} variabel rasio efisiensi Belanja Daerah sebesar 1,007 < T_{tabel} sebesar 3,182 dan tingkat signifikansi sebesar (0,388 > 0,05).

3. Uji F menunjukkan F_{hitung} sebesar 12,352 > F_{tabel} sebesar 9,55 dan tingkat signifikansi sebesar (0,035 < 0,05)

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran pada peneliti selanjutnya akan bermanfaat untuk menambah referensi, wawasan yang akan dijadikan bahan informasi dan tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Didalam penelitian ini hanya menggunakan sampel dengan periode selama 6 tahun. Diharapkan peneliti selanjutnya memperpanjang periode penelitian dan memiliki sampel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhari, A. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *Dialog*, 44(1), i–Vi.
- Aulia, R., & Sari, I. (2023). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Dengan Belanja Pegawai Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021). *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 152–167. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>
- Awaliyah, S. R., & Efendri. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>
- IJTIHAD, R., & HARSONO, I. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ganec Swara*, 18(1), 41. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Nur Shafira Anynda. (2020). *PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENGELOLAAN*

**BELANJA DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH.**

- Prasetyo, V. R., Lazuardi, H., Mulyono, A. A., & Lauw, C. (2021). Penerapan Aplikasi RapidMiner Untuk Prediksi Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Dengan Metode Linear Regression. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i1.2021.8-17>
- SAIFRIZAL, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Di Kabupaten Bireuen. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(3), 202–203. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1561>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 148. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Keabsahan data. *INA-Rxiv*, 1–22.